

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Melalui penelitian yang sudah dijalankan, peneliti dapat menyimpulkan berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Terbagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

Kesimpulan umum penelitian ini adalah keterbukaan informasi publik menjadi pilar penting dalam mewujudkan *Good University Governance* di Universitas Negeri Semarang (UNNES). Implementasi kebijakan yang transparan dan inklusif tidak hanya meningkatkan akuntabilitas institusi, tetapi juga memperkuat integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap UNNES sebagai lembaga pendidikan tinggi.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, UNNES dapat memastikan bahwa semua proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya dilakukan secara adil dan transparan. Hal ini tidak hanya relevan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan internal, tetapi juga penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan universitas.

Kesimpulan khususnya ialah, meliputi:

1. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik atau *public information disclosure* di Universitas Negeri Semarang (UNNES) telah memberikan dampak positif dalam mewujudkan *good university governance*. Beberapa indikator menunjukkan bahwa UNNES telah berhasil meningkatkan (1) transparansi, (2) akuntabilitas, (3) partisipasi masyarakat, dan (4) kepercayaan publik. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki, seperti (1) ketersediaan informasi spesifik, (2) distribusi informasi yang merata, dan (3) kualitas penyampaian informasi. Upaya perbaikan dapat melibatkan langkah-langkah konkret, seperti (1) meningkatkan transparansi pelaporan keuangan UNNES, (2) meratakan ketersediaan informasi publik di seluruh unit kerja, (3) memperbaiki kualitas penyampaian informasi agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat, dan (4) pelibatan aktif dari seluruh komunitas kampus, termasuk staf, mahasiswa, dan masyarakat umum. Upaya memperbaiki dan mengoptimalkan implementasi kebijakan keterbukaan

informasi publik, UNNES memperkuat posisinya sebagai lembaga pendidikan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Langkah-langkah ini tidak hanya mendukung pencapaian tujuan-tujuan strategis universitas, tetapi juga menciptakan hubungan yang positif dan harmonis antara UNNES dan stakeholder yang beragam.

2. Pemenuhan hak warga negara untuk mengakses keterbukaan informasi publik Universitas Negeri Semarang dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan menunjukkan bahwa (1) pemahaman tentang keterbukaan informasi publik bervariasi di antara mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan; (2) mahasiswa memiliki pemahaman yang lebih tinggi, sementara tenaga kependidikan cenderung memiliki pemahaman yang lebih rendah; dan (3) mahasiswa menyadari bahwa hak untuk mengakses informasi publik di UNNES merupakan haknya sebagai warga negara. Terkait hal ini, UNNES telah mendorong peningkatan partisipasi warga negara terutama mahasiswa, dalam pengambilan keputusan universitas. UNNES melakukan sejumlah langkah penting dan signifikan yaitu (1) mendirikan forum atau mekanisme formal yang memungkinkan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan; (2) mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan dan kebijakan keterbukaan informasi publik guna menciptakan lingkungan universitas yang lebih demokratis dan responsif.
3. Kendala pemenuhan hak masyarakat dapat mengakses keterbukaan informasi publik Universitas Negeri Semarang dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan yaitu (1) kebijakan keterbukaan informasi yang masih perlu diperkuat; (2) keterbatasan akses fisik dan teknologi, terutama di kalangan masyarakat umum, juga menjadi kendala signifikan. Perlu dilakukan peningkatan infrastruktur fisik dan teknologi, termasuk perluasan ruang akses, penyediaan fasilitas komputer, dan ketersediaan koneksi internet yang lebih stabil; (3) kurangnya kesadaran kewarganegaraan di kalangan mahasiswa. Integrasi materi kewarganegaraan dan keterbukaan informasi dalam kurikulum perkuliahan, pembentukan kelompok mahasiswa, dan peran dosen sebagai model teladan dapat menjadi langkah-langkah strategis untuk meningkatkan

pemahaman dan motivasi mahasiswa terkait keterlibatan aktif dalam pemenuhan hak akses terhadap informasi publik.

5.2 Implikasi

Hasil temuan penelitian dan hasil pembahasan yang sudah diuraikan, peneliti melihat adanya implikasi penelitian. Implikasi penelitian tersebut, yakni:

5.2.1 Implikasi Teoretis

Berdasarkan seluruh informasi yang terkumpul, implikasi teoritis dari implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik atau *public information disclosure* di Universitas Negeri Semarang mewujudkan *good university governance* ataupun pengelolaan perguruan tinggi terbaik mengarah pada pengembangan teori dan paradigma baru dalam studi kebijakan. Teori-teori yang pernah mendominasi kebijakan keterbukaan informasi publik perlu disesuaikan dengan realitas era digital yang semakin berkembang pesat.

Pertama, teori *good university governance*. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di UNNES telah memberikan dampak positif mewujudkan *good university governance* ataupun pengelolaan perguruan tinggi terbaik. Implikasi teoretisnya adalah bahwa aspek-aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kepercayaan publik menjadi kunci dalam membangun tata kelola universitas yang baik (*good university governance*). Konsep *good university governance* dapat diperkaya dengan mempertimbangkan pentingnya keterbukaan informasi sebagai elemen kunci dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Kedua, teori pendidikan kewarganegaraan. Penelitian menyoroti peran UNNES dalam memenuhi hak akses warga negara terhadap informasi publik dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Implikasi teoretisnya adalah bahwa perguruan tinggi dapat menjadi agen utama dalam membentuk kewarganegaraan yang sadar informasi. Integrasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum dan peran mahasiswa sebagai agen perubahan menyoroti pentingnya pemahaman dan partisipasi aktif dalam konteks informasi publik.

Ketiga, teori partisipasi masyarakat. Penelitian menyoroti peran penting partisipasi aktif seluruh komunitas kampus, termasuk staf, mahasiswa, dan masyarakat umum, dalam membangun budaya keterbukaan yang kuat. Implikasi

teoretisnya adalah bahwa konsep partisipasi masyarakat dapat diperkaya dengan memasukkan dimensi keterbukaan informasi sebagai sarana utama untuk membangun keterlibatan aktif dan konstruktif dari berbagai pihak.

Keempat, teori hak asasi manusia. Evaluasi pemenuhan hak akses terhadap informasi publik di UNNES dapat dianalisis dalam kerangka hak asasi manusia. Implikasi teoretisnya adalah bahwa kebijakan dan praktik keterbukaan informasi di perguruan tinggi perlu dianalisis dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak dalam mengakses informasi sebagai hak dasar yang mendukung partisipasi dan akuntabilitas.

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman teoretis tentang penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di perguruan tinggi dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan konsep seperti tata kelola perguruan tinggi yang baik, pendidikan kewarganegaraan, partisipasi masyarakat, dan hak asasi manusia.

5.2.1 Implikasi Praktis

Penelitian mengenai implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik atau *public information disclosure* di Universitas Negeri Semarang (UNNES) dalam upaya mewujudkan *good university governance* memiliki sejumlah implikasi praktis yang dapat diusulkan untuk diterapkan. Pertama, perlu dilakukan perbaikan dalam transparansi pelaporan keuangan UNNES dengan menyajikan laporan keuangan yang lebih terperinci dan mudah dipahami oleh masyarakat. Langkah konkret ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan institusi.

Selanjutnya, diperlukan usaha untuk meratakan ketersediaan informasi publik di seluruh unit kerja UNNES dengan mengembangkan pedoman yang jelas dan melibatkan seluruh komunitas kampus dalam proses tersebut. Peningkatan infrastruktur fisik dan teknologi, termasuk perluasan ruang akses, penyediaan fasilitas komputer, dan peningkatan koneksi internet, juga perlu diimplementasikan untuk mengatasi keterbatasan akses fisik dan teknologi, terutama di kalangan mahasiswa. Selain itu, perlu dilakukan revisi kebijakan keterbukaan informasi agar lebih spesifik dan melibatkan unit kerja terkait, termasuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penguatan pendidikan kewarganegaraan,

melibatkan mahasiswa sebagai agen perubahan, dan integrasi etika informasi serta partisipasi dalam kurikulum diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi warga negara di lingkungan kampus.

Terakhir, UNNES perlu mendirikan forum atau mekanisme formal yang memungkinkan mahasiswa terlibat dalam konteks pengambilan keputusan universitas untuk mendukung terciptanya lingkungan yang demokratis serta responsif. Evaluasi periodik terhadap implementasi kebijakan keterbukaan informasi juga perlu dilakukan dengan melibatkan kolaborasi antar unit kerja terkait. Dengan menerapkan langkah-langkah praktis ini, diharapkan UNNES dapat memperkuat transparansi, memenuhi hak akses warga negara, dan mewujudkan *good university governance* secara lebih efektif.

5.3 Rekomendasi

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan saran dan rekomendasi dengan mempertimbangkan temuan penelitian dan pembahasan. Beberapa hal yang dapat direkomendasikan tersebut, yakni:

5.3.1 Bagi Pihak Universitas Negeri Semarang

UNNES perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap aspek-aspek yang masih perlu perbaikan dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik., seperti:

- a. Meningkatkan transparansi pelaporan keuangan secara lebih detail dan spesifik.
- b. Memastikan pemerataan ketersediaan informasi publik di seluruh unit kerja UNNES
- c. Memperbaiki kualitas penyampaian informasi.
- d. Menyelenggarakan program pelatihan dan kampanye penyuluhan keterbukaan informasi publik guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif.

5.3.2 Bagi Pihak PPID Universitas Negeri Semarang

PPID UNNES memiliki peran kunci dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi. Terdapat sejumlah rekomendasi bagi PPID UNNES, seperti:

- a. Meningkatkan koordinasi serta kolaborasi antar unit kerja terkait untuk memastikan kejelasan dan ketersediaan informasi publik.
- b. Melakukan evaluasi periodik terhadap kebijakan yang ada.
- c. Menggali masukan dari pengguna layanan informasi.
- d. Mengoptimalkan peran sebagai pengelola informasi yang efektif.

5.3.3 Bagi Pihak Pengguna Layanan Informasi Universitas Negeri Semarang

Bagi para pengguna layanan informasi, termasuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan terdapat beberapa rekomendasi, yakni:

- a. Menjadi agen perubahan dengan lebih aktif berpartisipasi dalam memahami dan mendukung kebijakan keterbukaan informasi.
- b. Memberikan masukan konstruktif melalui mekanisme umpan balik yang disediakan oleh UNNES.
- c. Meningkatkan literasi digital agar pengguna dapat mengakses informasi secara efektif.

5.3.4 Bagi Pihak Komisi Informasi Pusat

Rekomendasi penelitian bagi Komisi Informasi Pusat , yakni:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap badan publik secara konsisten.
- b. Memastikan bahwa situs web dan basis data yang dimiliki oleh badan publik dapat diakses dengan mudah dan efisien.

5.3.5 Bagi Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UNNES

Rekomendasi bagi Program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UNNES, yakni:

- a. Melakukan peningkatan literasi informasi melalui program pelatihan untuk meningkatkan literasi informasi di kalangan mahasiswa dan dosen.
- b. Mengembangkan kampanye sosialisasi kebijakan keterbukaan informasi publik di lingkungan kampus.
- c. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak guna menguatkan penyebaran informasi publik.

- d. Mengkolaborasikan materi tentang keterbukaan informasi dan *good governance* dalam kurikulum perkuliahan.

5.3.6 Bagi Program Studi S2 Pendidikan Kewarganegaraan UPI

Rekomendasi bagi Program studi S2 Pendidikan Kewarganegaraan UPI, yakni:

- a. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak seperti lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat untuk memperkuat jaringan dalam penyebaran informasi publik dalam rangka mendukung implementasi keterbukaan informasi publik.
- b. Mengintegrasikan materi tentang keterbukaan informasi, *good governance*, dan hak warga negara dalam kurikulum program studi.

5.3.7 Bagi Peneliti Selanjutnya

Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya, yakni:

- a. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada evaluasi dampak konkret dari perbaikan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik terhadap pencapaian tujuan *good university governance* di UNNES.
- b. Penelitian dapat mengeksplorasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, baik dari internal maupun eksternal.
- c. Menjelajahi praktik terbaik dalam konteks keterbukaan informasi di perguruan tinggi.
- d. Melakukan studi komparatif dengan institusi pendidikan lainnya juga dapat memberikan wawasan lebih mendalam terkait strategi yang efektif untuk mewujudkan *good university governance* melalui kebijakan keterbukaan informasi.